

KOLABORASI IMPLEMENTASI PROGRAM BPNT DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

Anis Salsabila, Hary Priyanto, Leni Vitasari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi
E-mail: anissalsabila540@gmail.com

Absrak: Kolaborasi Implementasi Program BPNT Dalam Penanganan Kemiskinan Di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanganan kemiskinan melalui implementasi program BPNT di Desa Karetan. Pentingnya penelitian ini karena terdapat fenomena adanya pendistribusian BPNT yang kurang tepat sasaran di Desa Karetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang dikelola berdasarkan data jenuh dan dianalisis berdasarkan pemikiran Albrecht dan Zemke. Hasil penelitian ini yaitu kurang maksimalnya strategi yang dilakukan oleh Pemdes Karetan dalam penanganan kemiskinan dan pendistribusian bantuan yang kurang tepat sasaran; perlunya berpedoman pada kebenaran data dan kepatuhan Pemdes Karetan pada peraturan perundang-undangan, prosedur pelayanan terkait fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat; peningkatan kualitas SDM petugas, karena tidak semua SDM yang ada memiliki kualifikasi dan pemahaman terkait tupoksi dan prosedur yang ada; kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Pemdes Karetan kepada masyarakat. Implementasi Pemdes Karetan mengurangi angka kemiskinan perlu dievaluasi dari aspek strategi, sistem, dan SDM yang lebih baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Karetan.

Kata Kunci: kemiskinan, BPNT, Desa Karetan

Abstract: Collaboration on the Implementation of the BPNT Program in Handling Poverty in Karetan Village, Purwoharjo District, Banyuwangi Regency. This study aims to identify and describe the handling of poverty through the implementation of the BPNT program in Karetan Village. The importance of this research is because there is a phenomenon of the distribution of BPNT that is not well targeted in Karetan Village. This research uses a qualitative descriptive approach, which is carried out intensively, in-depth, in detail and comprehensively. The research sources used primary data and secondary data which were managed based on saturated data and analyzed based on the thoughts of Albrecht and Zemke. The results of this study are that the strategies carried out by the Karetan Village Government are less than optimal in dealing with poverty and the distribution of aid that is not well targeted; the need to be guided by the correctness of the data and the compliance of the Karetan Village Government with laws and regulations, service procedures related to facilities needed by the community; improving the quality of human resources for officers, because not all existing human resources have the qualifications and understanding related to the main tasks and procedures; less than the maximum service provided by the Karetan Village Government to the community. The implementation of the Karetan Village Government in reducing poverty needs to be evaluated from the aspect of strategy, system, and better human resources, so that it has an impact on the welfare of the Karetan Village community.

Keywords: poverty, BPNT, Karetan Village

Pendahuluan

Kemiskinan pada masyarakat desa merupakan fenomena penghambat dalam pembangunan. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu: pendidikan, tingkat pendapatan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis dan lokasi lingkungan. Poerwodarminto

(dalam Idris, 2007); Sirenden, et al (2017); dan Rajab (2006) menyatakan bahwa, kemiskinan sebagai ketidak-mampuan dalam mencukupi kebutuhan primer maupun sekunder, baik langsung maupun tidak langsung yang mengganggu kemartabatan hidup. Berpijak dari pernyataan tersebut, maka fenomena kemiskinan harus ditangani

dengan serius. Model kolaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat merupakan hal tepat.

Fenomena kemiskinan bisa terjadi di mana saja, termasuk di Desa Karetan. Pegawai-1, bernama Wawan, kasi administrasi Desa Karetan, jenis kelamin laki laki, pada tanggal 15 November 2021, menginformasikan kepada peneliti jika jumlah orang miskin di Desa Karetan adalah 1.279 jiwa, yang terbagi: 601 berjenis kelamin laki-laki, dan 678 berjenis kelamin perempuan, dari jumlah penduduk 3.075 jiwa. Tingginya angka kemiskinan di Desa Karetan merupakan fenomena serius. Pemerintah Desa (Pemdes) Karetan menangani kemiskinan melalui tata kelola program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini merupakan model penanganan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui pemberian kupon elektronik (e-voucher) untuk digunakan membeli beras dan telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Sebagaimana disampaikan Pegawai-1, jumlah penerima BPNT di Desa Karetan sebanyak 372 warga. Berdasarkan pernyataan Pegawai-1 tersebut, bahwa jumlah program BPNT tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin.

BPNT bukan program bantuan langsung tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli, tetapi lebih terfokus pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai tersebut diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima.

Program BPNT diimplementasikan kepala desa selaku kepala pemerintahan di Desa Karetan yang berkolaborasi dengan Badan Permusyaratan Desa (BPD). Model kerja kolaborasi tersebut bertujuan agar implementasi program pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.

BPD merupakan lembaga legislatif ditingkat

desa yang mewakili masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD Karetan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kinerja, legislasi, dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemdes Karetan. Penerapan model kolaborasi antara Pemdes Karetan dan BPD Karetan merupakan hal penting karena bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang ideal, benar, dan peka terhadap kebutuhan, perkembangan, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Karetan.

Penanganan kemiskinan pada Desa Karetan belum berjalan maksimal karena ada fenomena pendistribusian bantuan BPNT yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat KPM. Hal tersebut bertentangan dengan harapan masyarakat miskin, sebagai pihak yang berhak menerima bantuan melalui program BPNT. Warga-1 dengan inisial SU (nama asli dirahasiakan atas permintaan yang bersangkutan), jenis kelamin perempuan, usia 60 tahun, mengungkapkan bahwa, tidak semua keluarga yang miskin dapat bantuan itu. Malah banyak orang-orang mampu yang mendapatkannya. Keluarga dan orang-orangnya kepala desa banyak yang dapat, padahal mereka sudah bekerja dan punya penghasilan.

Pernyataan Warga-1 tersebut menegaskan bahwa adanya realitas perilaku menyimpang dalam pembagian bantuan BPNT kepada masyarakat miskin. Fenomena tersebut bertentangan dengan ayat 15 dan 16 dalam Pasal 1 pada Peraturan Daerah (Perda) Banyuwangi, nomor 20 tahun 2020, tentang Penanggulangan Kemiskinan, serta bertentangan dengan pendapat Rachman (2018) yang menyatakan bahwa, penyaluran beras bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM dalam pemenuhan kebutuhan pokok dari hak dasarnya.

Priyanto (2018) mengungkapkan bahwa, kebijakan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mendasari pernyataan tersebut maka implementasi kebijakan tentang penyaluran bantuan BPNT pada Pemdes Karetan kepada KPM di Desa Karetan telah terlaksana, akan

tetapi masih belum sesuai dengan harapan masyarakat miskin. Pelayanan dalam bentuk penyaluran bantuan BPNT merupakan program penting pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karetan, karena menyangkut pada aspek kehidupan yang sangat luas, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak setiap masyarakat Desa Karetan atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Dalam prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), bahwa kualitas pelayanan di Desa Karetan harus berdampak pada kepuasan masyarakat sasaran.

Kebijakan penyaluran bantuan BPNT memerlukan kolaborasi antara Pemdes Karetan dengan masyarakat agar program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Berhasil atau tidaknya penyaluran bantuan BPNT bergantung pada partisipasi masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator, konsultan dan pengendali. Penyaluran bantuan yang tidak transparan akan menyebabkan masalah baru di Desa Karetan, selain karena ada ketimpangan jumlah BPNT dan masyarakat miskin, juga karena adanya fenomena masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak menerima, sedangkan warga tidak layak menerima justru menerima, sebagaimana pengungkapan Warga-1. Realitas tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan pada Pemdes Karetan.

Salah satu strategi pelayanan berupa penyaluran bantuan BPNT kepada masyarakat miskin di Desa Karetan sudah dilaksanakan. Tetapi adanya fenomena yang menyimpang dalam pengimplementasian bantuan kepada masyarakat miskin menyebabkan implementasi program tersebut tidak memberikan kepuasan masyarakat. Tujuan yang diinginkan Pemdes Karetan dan realitas implementasi yang tidak tepat sasaran merupakan kendala pada program ini. Perlu strategi yang efektif agar program pengentasan kemiskinan di Desa Karetan tersebut dapat tercapai sesuai tujuan. Berdasarkan ulasan tersebut maka strategi pelayanan merupakan hal penting dalam penelitian skripsi ini.

Perkembangan sistem informasi terkait pengelolaan data bantuan sangat perlu

karena dapat mengurangi keresahan dan kesalahan dalam penginputan data, dan lebih transparan karena bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Transparansi proses pengelolaan bantuan masyarakat miskin berdampak pada kepercayaan masyarakat pada Pemdes Karetan, meski pada sisi lain masyarakat ingin mendapatkan bantuan dengan cepat dan merata. Deskripsi ini sebagai penjelasan bahwa jumlah masyarakat miskin jauh lebih banyak jika dibanding dengan jumlah penerima bantuan BPNT.

Pemdes Karetan memiliki kewenangan untuk mengatur, mengayomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem. Meskipun Pemdes Karetan memiliki sifat memaksa dan memonopoli, namun pada sisi lain memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi penanganan kemiskinan yang telah dilakukan, termasuk menerima saran dan kritik dari masyarakat. Berdasarkan ungkapan tersebut, maka sistem pelayanan merupakan hal penting dalam penelitian skripsi ini.

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karetan diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya aparatur Desa Karetan harus meningkat sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keberadaan pegawai merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Karetan, karena berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, kemampuan dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan, kemampuan mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan.

Kualitas pelayanan yang diberikan Pemdes Karetan kepada masyarakat harus mendukung kebutuhan masyarakat. Fakta masih terdapat beberapa keluhan dan kegagalan seperti kurang tepat sasaran dari penyaluran bantuan BPNT kepada masyarakat, sebagai pertanda bahwa

pegawai pelayanan dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan masih lemah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mendasari realitas tersebut maka pegawai sebagai SDM pelayanan merupakan hal penting dalam penelitian skripsi ini.

Pendeskripsian hasil observasi, pengungkapan fenomena masalah dan gap yang diasosiasikan dengan pemikiran Albert dan Zamke (dalam Soekarwo, et al 2006:72) yang terdiri dari: strategi, sistem, SDM, dan customer sebagai titik pusat menjadi alasan peneliti untuk menetapkan judul: Kolaborasi Pemerintah Desa Dalam Penanganan Kemiskinan Di Desa Karetan; Studi Pada Implementasi Program BPNT Di Desa Karetan.

Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

1.1 Konsep Ilmu Administrasi dalam Good Governance

Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 (tiga) elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Keban (dalam Wardani, 2019) Administrasi Publik merupakan medan di mana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara.

Berdasarkan ungkapan di atas, bisa dipahami bahwa administrasi publik mampu mengubah perilaku, keberadaan dan kompetensi sumber daya yang ada, maka secara makro akan menunjukkan kesejahteraan suatu negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembenahan pola lama ke pola baru yang lebih dinamis dan tentunya inovatif dalam melaksanakan sebuah pelayanan. Pelayanan yang baik merupakan sebuah bentuk layanan yang

dapat menimbulkan rasa puas dari setiap penggunaannya dan walaupun adanya kritikan, tetapi hal tersebut harus menjadi pendorong untuk peningkatan pelayanan ke arah yang lebih baik.

Dalam penelitian ini makna good governance merupakan upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang makin harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (*state*), swasta (*private*), dan masyarakat sipil (*civil society*) yang didukung oleh penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan. *Good governance* yang dimaksud merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *service* disebut *governance* (pemerintah/kepermerintahan), sedangkan praktes terbaiknya disebut "*good governance*" (kepermerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

1.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu seperti tidak dapat

memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Adisasmita (dalam Ferezagia, 2018) mengungkapkan bahwa, indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, serta pendidikan. Selain daripada itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Sama halnya dengan kemiskinan di Desa Karetan, bahwasannya kemiskinan di Desa Karetan ada karena beberapa faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan juga tingkat pendidikan.

1.3 Aspek Program BPNT

BPNT adalah bantuan sosial yang ditransformasi dari bantuan beras sejahtera yang memiliki beberapa permasalahan dalam penyalurannya. Pada awal tahun 2017 anggaran penyaluran manfaat dilakukan melalui mekanisme non tunai (menggunakan teknologi kupon elektronik atau *e-voucher*) dimana diharapkan dapat tepat sasaran dan lebih mudah dijangkau. Karena prinsipnya program BPNT adalah mudah dijangkau KPM dan dapat digunakan, memberikan keleluasaan dan kendali dalam memilih kuantitas dan kualitas bahan pangan, mendorong usaha eceran untuk melayani

KPM serta KPM diberikan akses jasa keuangan.

Tujuan dari adanya program BPNT yaitu: mengurangi beban pengeluaran KPM dalam memenuhi sebagian pangannya; agar gizi KPM meningkat; waktu dan tepat sasaran meningkat; KPM dapat kendali memilih bahan pangan yang diinginkan; mendorong *sustainable development goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan). Adapun manfaat dari program BPNT yaitu: penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan jaminan sosial meningkat; efisiensi meningkat dalam penyaluran; meningkatkan transaksi non tunai sebagai upaya dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT); pertumbuhan ekonomi meningkat terkhusus usaha mikro kecil.

Prinsip utama dari program BPNT yang telah ditetapkan pemerintah dan menjadi komitmen untuk terus di jaga oleh pihak-pihak terkait, yaitu: Pertama, kemudahan akses untuk dijangkau oleh KPM; Kedua, memberikan kendali kepada KPM untuk memilih bahan pangan, menentukan harga, kualitas, jenis barang, kapan pendistribusian, serta tepat untuk mengambil BPNT sesuai dengan preferensi (tidak terpaku pada ewarung tertetu dan bantuan pangan tidak dipaketkan); Ketiga, mendorong dan meningkatkan usaha mikro dan eceran rakyat dengan melayani KPM; Keempat, ewarung mendapatkan kebebasan untuk membeli pasokan bahan pangan dari berbagai tempat, sehingga mendapatkan ruang pemasok dengan lebih optimal; Kelima, bank penyalur hanya bertugas untuk menyalurkan dana bantuan ke kartu rekening penerima, dan tidak berhak mendistribusikan bantuan bahan pangan kepada KPM.

1.4 Aspek Kolaborasi

Kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kolaborasi menyelesaikan visi bersama, mencapai hasil positif bagi khalayak yang mereka layani, dan membangun sistem yang saling terkait untuk mengatasi masalah dan peluang. Kolaborasi juga melibatkan berbagi sumber daya dan tanggung jawab untuk secara

bersama merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama.

Tadjudin (dalam Dorisman, 2021) mengungkapkan, kolaborasi merupakan tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar (*win-to-win*), dalam perspektif kerjasama antar *stakeholder*, kolaborasi merupakan konsep relasi antar organisasi, relasi antar pemerintahan, dan *network* multi organisasi.

Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kolaborasi membahas tentang kerjasama antara dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. Konsep kolaborasi juga diterapkan oleh Pemdes Karetan dalam menjalankan suatu program agar program tersebut berjalan dengan baik. Kolaborasi yang dilakukan Pemdes Karetan dalam pengimplementasian program BPNT kepada masyarakat KPM di Desa Karetan masih belum berjalan secara maksimal, dimana masih adanya fenomena pada penyaluran BPNT.

Proses kolaborasi digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini kolaborasi juga melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi diharapkan mendapatkan hasil yang inovatif, terobosan, ataupun prestasi secara bersama yang dapat memuaskan semua pihak yang terkait. Kolaborasi juga dapat memunculkan perkembangan dalam organisasi dan merealisasikan visi bersama dalam lingkungan yang kompleks.

1.5 Aspek Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tenteram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tertera pada pasal 1 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang atau organisasi baik organisasi swasta ataupun organisasi pemerintahan. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tak dapat berjalan secara mulus, akan tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan sosial merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk menolong orang-orang yang berada di bawah tekanan sosial tertentu untuk meraih kembali keseimbangan, kepercayaan dirinya dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Friedlander dan Apte (dalam Hasimi, 2020) mengungkapkan, bahwa, fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ungkapan tersebut, fungsi dari kesejahteraan sosial yaitu: Pertama, fungsi pencegahan (*preventive*). Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru; Kedua, fungsi penyembuhan (*curative*). Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi); Ketiga, fungsi pengembangan (*development*). Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan

langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat; Keempat, fungsi penunjang (*supportive*). Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Salah satu tujuan Pemdes Karetan dalam penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan BPNT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat KPM. Dalam hal ini kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan perubahan kehidupan masyarakat ke arah positif tetapi yang terorganisir yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial (hubungan), serta peningkatan kehidupan masyarakat Desa Karetan yang selaras dengan standart norma-norma masyarakat yang ada di lingkungan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola pikir atau kerangka pemikiran yang disampaikan Albrecht dan Zamke (dalam Soekarwo, et al 2006:72) yang terfokus pada 4 (empat) aspek, yaitu: strategi, sistem pelayanan, SDM dan customer sebagai titik pusat. Pemerintah Desa Karetan merupakan lokus dari penelitian ini, dimana hal tersebut menggambarkan upaya dari Pemdes Karetan dalam penanganan kemiskinan melalui program BPNT. Dalam penanganan kemiskinan melalui penyaluran program BPNT penting bagi Pemdes Karetan dalam memperhatikan beberapa aspek yaitu strategi dalam penanganan kemiskinan, sistem pendataan dan juga sistem pelayanan, SDM dari Pemdes Karetan dan petugas penyalur program BPNT, serta customer atau masyarakat sebagai tujuan dari Pemdes Karetan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Karetan. Sebagaimana isi pemikiran tersebut bahwa, kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek yaitu: strategi, sistem, SDM penyedia pelayanan, dan customer sebagai titik pusat

Metode Penelitian

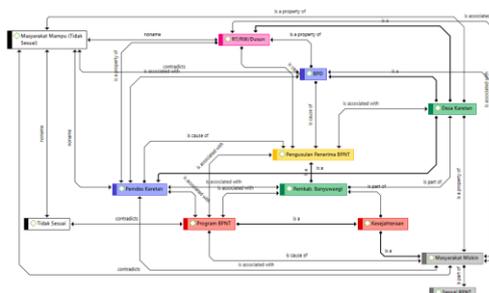
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017:4) bahwa, metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan kualitatif akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan secara relevan. Pendekatan kualitatif tersebut mampu memperoleh data lebih mendalam, mampu mengembangkan sebuah teori dan mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari suatu masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, suatu kegiatan, sikap, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Lokasi penelitian di Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles dan Hubberman (dalam Sukmawati, *et al* 2020) dimana analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu uji kredibilitas, uji keteralihan, uji kebergantungan, dan uji konfirmabilitas.

Pembahasan

Kolaborasi Implementasi Program BPNT

1. Aspek Strategi



Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa, Kementerian Sosial memiliki program BPNT yang terfokus pada kesejahteraan, dimana hal tersebut merupakan tujuan dari Pemkab banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki salah satu wilayah desa yang bernama Desa Karetan dengan kualifikasi masyarakat miskin dan masyarakat mapu. Kesejahteraan dalam program BPNT konsep sesuainya adalah masyarakat miskin, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Program BPNT ini tersalurkan kepada masyarakat mampu dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari program BPNT. Program tersebut berangkat dari pengusulan program BPNT yang dilakukan oleh Pemdes Karetan. Dalam hal ini Pemdes Karetan bekerja sama dengan pihak RT/RW/Dusun yang kemudian dibantu oleh BPD dan data pengusulan masyarakat penerima program BPNT tersebut diserahkan kepada Pemdes Karetan yang kemudian dikelola lebih lanjut.

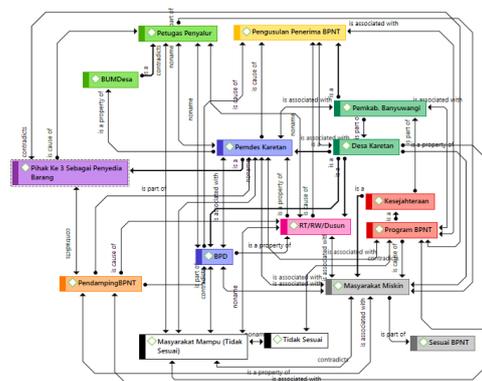
strategi pelayanan merupakan hal penting dalam penyaluran program BPNT dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan. Strategi merupakan suatu keputusan tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan. Adanya strategi yang dilakukan oleh Pemdes Karetan merupakan suatu cara bagaimana Pemdes Karetan dalam menyikapi keadaan dan kenyataan dalam menyelesaikan dan terbebas dari permasalahan kemiskinan. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemdes Karetan dalam penanganan kemiskinan melalui program BPNT secara tepat sasaran, perlindungan terhadap keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru, strategi peningkatan kualitas SDM. Bentuk dari strategi tersebut dengan adanya penyediaan kebutuhan pokok,

pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha.

Strategi yang harus dilakukan oleh Pemdes Karetan yaitu, memperbaiki sistem pendataan sasaran penerima bantuan. Dimulai dari tingkat desa melalui digitalisasi monografi (rincian data statistik pemerintahan) desa yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendataan sasaran penerima bantuan. Monografi desa akan terhubung dengan data kependudukan di pemerintah daerah dan secara rutin dilakukan verifikasi dan validasi untuk memperbarui data penerima program BPNT. Pemdes Karetan bersama pendamping desa akan tergabung dalam tim yang bertanggung jawab dalam pembaruan data, pembaruan data dibuat lebih terbuka sehingga dapat dipantau masyarakat sebagai customer. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan bantuan sehingga masyarakat mempunyai pemahaman penuh mulai dari informasi penerimaan, besaran, cara memperoleh, dan metode pencairan bantuan sampai diterima masyarakat. Pemdes Karetan juga perlu mensosialisasikan proses pengecekan, pengawasan, dan pelaporan apabila bantuan sosial yang diterima masyarakat.

Penanganan kemiskinan dalam implementasi program BPNT harus lebih diperhatikan lagi terkait pemilihan sasaran dari penerima bantuan, supaya program BPNT dapat memberikan suatu hasil yang diharapkan oleh penerima yaitu masyarakat sebagai *customer* dan Pemdes Karetan selaku penyalur bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Aspek Sistem



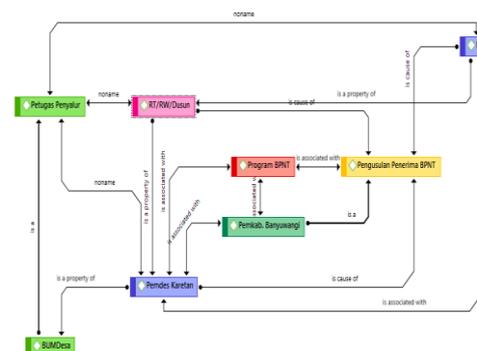
Berdasarkan bagan tersebut dapat kita pahami bahwa, Pemkab Banyuwangi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui program BPNT. Salah satu wilayah yang menerapkan program tersebut yaitu Desa Karetan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat miskin. Untuk sistem pendataan pengusul penerima program BPNT, Pemdes Karetan dibantu atau berkolaborasi dengan RT/RW/Dusun dan juga BPD, data tersebut akan diserahkan kepada Pemdes Karetan yang didampingi oleh pendamping program BPNT. Terkait dengan sistem penyaluran program BPNT ada pihak ke tiga sebagai penyedia barang yang bekerjasama dengan pihak BUMDes milik Desa Karetan, yang kemudian disalurkan oleh petugas penyalur program BPNT yang diserahkan kepada masyarakat KPM di Desa Karetan.

Pemdes Karetan dalam hal ini memiliki peran penting terkait dengan pendataan masyarakat mana yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak. Melalui sistem yang lebih baik diharapkan bisa memperbaiki sistem sebelumnya dengan melakukan pendataan kepada masyarakat berhak penerima bantuan dengan diawali dari pendataan dasar. Pemdes mengolah data penduduk, data kepala keluarga, pengajuan calon penerima bantuan, data laporan masyarakat dan data hasil penyaluran yang melibatkan RT maupun BPD. Sedangkan untuk sistem pembayaran yang digunakan sebagai alat penyaluran BPNT kepada KPM adalah kartu keluarga sejahtera. Untuk BPNT, kartu keluarga sejahtera digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa oleh KPM. Kartu keluarga sejahtera menyimpan besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan, jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang, dan manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai. Selain sistem informasi yang harusnya transparan supaya masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan, sistem pelayanan dan penyediaan ruang juga penting.

Pentingnya evaluasi kepada Pemdes Karetan dalam sistem pelayanan terkait pembagian bantuan melalui program BPNT, supaya masyarakat bisa mengetahui penginputan data terkait penerima bantuan dimana data tersebut bisa diakses oleh masyarakat, serta sistem pelayanan diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Sistem pelayanan merupakan hal penting dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan dalam implementasi program BPNT. Sistem pelayanan merupakan suatu prosedur atau tata cara yang diterapkan oleh Pemdes Karetan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat KPM sebagai penerima program BPNT. Sistem pelayanan yang diterapkan oleh Pemdes Karetan harus sesuai dengan kebutuhan customer yang diperankan oleh masyarakat penerima KPM.

Sistem merupakan hal penting dalam penyaluran program BPNT terkait dengan kualitas pelayanan harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi, serta memberikan informasi dan penginputan data terkait bantuan yang dapat dipahami dengan mudah serta fasilitas yang memadai. Sistem pelayanan yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik pula terkait implementasi program BPNT. Dalam memberikan pelayanan yang baik, maka Pemdes Karetan harus memiliki sifat ramah dan juga komunikatif untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat penerima KPM sebagai *customer*. Tersedianya sarana dan prasarana pada saat proses pelayanan yang diantaranya seperti tersedianya tempat duduk, tempat beribadah, pendingin udara, televisi, toilet dan lain sebagainya agar mereka merasa nyaman.

3. Aspek SDM



Berdasarkan bagan di atas dapat dipahami bahwa, SDM Pemdes dan petugas penyaluran BPNT merupakan hal yang penting. Dalam hal ini dibutuhkan pemdes dan petugas yang mampu memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan dengan baik, harus mampu memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai *customer*.

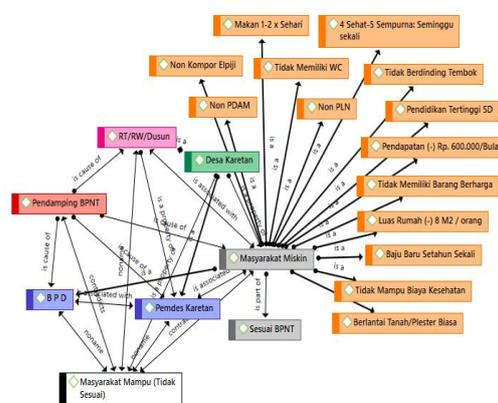
Program BPNT merupakan program yang diterapkan oleh Pemkab Banyuwangi yang ditujukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi salah satunya yaitu Desa Karetan. Pengimplementasian program BPNT memerlukan SDM yang baik, dimana pada Program BPNT ini terdapat pengusulan program BPNT. Berkaitan dengan pengusulan program BPNT tersebut peran Pemdes Karetan sangat penting, yang kemudian dibantu oleh RT/RW/Dusun dan BPD. Aspek SDM juga sangat penting bagi petugas penyaluran BPNT yang dibantu oleh pihak BUMDes. SDM sangat diperlukan oleh pihak-pihak tersebut dengan tujuan mewujudkan harapan masyarakat untuk hidup sejahtera.

SDM ini merupakan kunci dari keberhasilan penanganan kemiskinan di Desa Karetan yang dimana Pemdes Karetan dapat memahami, mengetahui dan memberikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat sebagai *customer*. Pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilakukan organisasi agar pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan demikian maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan.

Pengembangan SDM penting dilaksanakan dalam upaya menciptakan profesionalisme SDM dalam peningkatan kualitas hasil kerja demi terciptanya pelayanan prima. Dengan adanya SDM yang baik pada Pemdes Karetan ataupun petugas penyaluran program BPNT dapat menghasilkan suatu strategi dan sistem yang

baik dalam penyaluran bantuan kepada customer yang diperankan oleh masyarakat KPM. Adapun beberapa kriteria SDM aparatur yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan adalah SDM yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik yang antara lain mencakup: komitmen; integritas; tanggung jawab; kecakapan dan keramahan; daya tanggap dan empati; mempunyai etika dan moralitas yang tinggi; serta mengerti kebutuhan dari masyarakat sebagai *customer*.

4. Aspek Customer/Masyarakat



Berdasarkan bagan tersebut dapat dipahami bahwa, Masyarakat Desa Karetan dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan melalui implementasi program BPNT berperan sebagai *customer*. Kualitas pelayanan yang baik merupakan suatu keinginan dari masyarakat Desa Karetan. Kepuasan masyarakat Desa Karetan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dari Pemdes Karetan dalam penanganan kemiskinan melalui program BPNT.

Bagan tersebut menjelaskan atau memberi gambaran bahwa di Desa Karetan terdapat 2 (dua) kriteria masyarakat yaitu masyarakat miskin dan masyarakat mampu. Dalam penyaluran program BPNT di Desa Karetan didampingi oleh pendamping dari program BPNT yang melibatkan RT/RW/Dusun dan juga BPD untuk melihat kriteria masyarakat miskin, karena masyarakat miskin sesuai dengan program BPNT. Kriteria dari masyarakat miskin adalah luas lantai kurang dari 8m², jenis

lantai terbuat dari tanah atau plester biasa, jenis dinding dari kayu atau tembok berkualitas rendah, tidak memiliki fasilitas WC, sumber penerangan tidak dari PLN, sumber air minum tidak dari PDAM melalui air sungai, air hujan atau sumber mata air, bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah, mengkonsumsi daging dan susu seminggu sekali, membeli pakaian sekali dalam setahun, makan 2 kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan, pendapatan kurang dari Rp. 600.000,- per bulan, pendidikan paling tinggi SD, tidak memiliki barang berharga dengan nilai diatas Rp. 500.000,-. Masyarakat kaya yang mendapatkan program BPNT ini kontradiksi, tapi BPD, pemdes, RT/RT/Dusun menitipkan orang-orangnya, kolega atau saudara agar mendapatkan bantuan BPNT.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; Pertama, Aspek Strategi: strategi yang dilakukan oleh Pemdes Karetan dalam penanganan kemiskinan dan kurang tepat sasaran bagi Pemdes Karetan dalam menyalurkan program BPNT kepada masyarakat KPM di Desa Karetan; Kedua, Aspek Sistem: perlunya perbaikan sistem pelayanan terkait penginputan data penerima program BPNT agar lebih transparan, prosedur pelayanan terkait fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penerima program BPNT; Ketiga, Aspek SDM: peningkatan kualitas SDM pemdes dan petugas penyaluran program BPNT dalam pengetahuan, kemampuan, serta ketrampilan sebagai upaya penanganan kemiskinan. Keempat, Aspek Customer (Masyarakat): kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Pemdes Karetan kepada masyarakat sebagai customer dalam penyaluran program BPNT sebagai bentuk penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Karetan.

Saran

Adapun saran yang perlu dikemukakan peneliti sebagai berikut: Pertama, Aspek Strategi: seharusnya Pemdes Karetan bisa memaksimalkan strategi yang dilakukan untuk penanganan kemiskinan terutama melalui program BPNT dengan cara memberikan bantuan secara tepat sasaran; Kedua, Aspek Sistem: adanya perbaikan sistem yang harus dilakukan oleh Pemdes Karetan dalam hal pelayanan ataupun sistem terkait penginputan data yang lebih transparan terkait penanganan kemiskinan di Desa Karetan; Ketiga, Aspek SDM: terkait dengan SDM, seharusnya Pemdes Karetan harus bisa menyeleksi lebih baik terkait pegawai atau aparatur desa yang nantinya akan berkontribusi di dalam pemerintahan desa; Keempat, Aspek Customer (Masyarakat): harapan dari masyarakat sebagai customer yaitu dengan adanya strategi pelayanan, sistem pelayanan, dan juga SDM perangkat desa dan petugas dalam penanganan kemiskinan di Desa Karetan yang lebih baik yang tertuju untuk kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menganggap jika penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga perlu disempurnakan melalui penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini yaitu terkait dengan data, dimana peneliti sangat kesulitan mendapatkan data sebagai kelengkapan data untuk penelitian ini. Keterbatasan lain karena terbatasnya waktu penelitian dan surat perijinan untuk melaksanakan penelitian, dimana terkait waktu penelitian yang cukup singkat yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Selain daripada itu keterbatasan dari peneliti yaitu kurangnya pemahaman peneliti dalam memahami kalimat baku, karena peneliti tidak pernah terfokus dalam mempelajari linguistic (ilmu bahasa).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset;
Soekarwo., Fathorrasjid., Wijoyo., Dwiyanto., Rijadi., Ambtenaar., Said. *Pelayanan Publik Dari Dominasi Ke Partisipasi*. Surabaya: Airlangga University Perss;

Jurnal

- Dorisman,Asri., Suradji, Adji., and Setiawan, Ramadhani. 2021. Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 17 (1). 2714-55881. Retrieved From: <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7966>;
- Ferezegia, Debrianna Vita. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. 1 (1). 2622-1152. Retrieved From: <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/view/6>;
- Hasimi, Diah Mukmiatu. 2020. Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*. 1 (1). Retrieved From: www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/5762;
- Idris, Mardjoko. 2007. Problem Kemiskinan: Analisis Sebab dan Jalan Keluar. *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. 8 (1), 2598-2176. Retrieved from: <https://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/8324/1/MARDJOKO%20IDRIS%20PROBLEM%20KEMISKINAN%20ANALISIS%20SEEAB%20DAN%20JALAN%20KELUAR.pdf>;
- Priyanto, Hary. 2018. *Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. 7 (1), 2685-8517. doi:10.14421/welfare.2018.071-03;
- Rajab, Budi. 2006. *Memaknai Kemiskinan: Peran Kelembagaan Dalam Menanggulangi Lingkaran Setan Kemiskinan*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 8 (2). 2502-1966. doi: 10.14203/jmb.v8i2.188;
- Rachman, Benny., Adang Agustian, dan Wahyudi. 2018. Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 16 (1). 2549-7278. doi: 10.21082/akp.v16n1.2018.1-18;
- Sirenden, Etny., Muh. Rafiy., Irmawatty Paula Tamburaka. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. 2 (1), 2502-5171. doi: 10.33772/jpep.v2i1.8100;
- Sukmawati, A., Basri, H, M., Akhir, Muhammad. 2020. Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru Dan Pembiasaan Murid Sit Al Biruni Jipang Kota Makassar. *Education and Human Development Journal*. 5 (1). 2559- 0292. doi: 10.33086/ehdj.V5i1.1453;
- Wardani, Ari Kusumah. 2019. *Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik Di Era Disrupsi*. 6 (2). 2614-2945. doi: 10.25157/dinamika.v6i2.2258;

Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved From: https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2020/PERDA_NO_2_TA_HUN_2020_PENANGGULANGAN_KEMISKINAN.pdf;
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Retrieved From: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>;